



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PERIODE PENYELESAIAN PROYEK KERETA CEPAT JAKARTA BANDUNG

Monika Suhayati

Analisis Legislatif Ahli Madya
monika.suhayati@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), yang dimulai sejak 21 Januari 2016, saat ini berada dalam tahap krusial setelah masuk periode penyelesaian. Proyek ini mulanya ditargetkan selesai pada 2019, namun target tersebut mundur hingga menjadi Juni 2023 untuk mulai beroperasi secara terbatas. Dengan beroperasinya KCJB, Indonesia akan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki layanan kereta cepat. Perkembangan pembangunan fisik proyek ini telah mencapai 81,66% dan perkembangan investasi mencapai 91,40%.

Proyek KCJB berada di bawah tanggung jawab PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). KCIC merupakan perusahaan patungan antara konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium perusahaan perkeretaapian Tiongkok, Beijing Yawan HSR Co.Ltd dengan skema *business to business* (B2B). Sebagai proyek kerja sama Indonesia dan Tiongkok, KCJB telah sukses melalui uji coba disaksikan oleh Presiden RI Joko Widodo serta Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping secara virtual pada 16 November 2022. Uji coba tersebut merupakan bagian dari agenda pertemuan bilateral Indonesia-China di tengah kegiatan G20 di Bali. Uji coba KCJB menjadi *milestone* penting serta menjadi kunci kesuksesan *commercial operation date* (COD) pada pertengahan tahun 2023. Pada uji coba operasional tersebut, kereta inspeksi dijalankan sejauh 15 km dari Stasiun Tegalluar Bandung menuju Casting Yard 4 di atas jalur uji KCJB.

KCJB memiliki panjang *trase* 142,3 km, dengan tipe struktur *elevated* sepanjang 82,7 km dan sisanya berupa 13 *tunnel* dan *subgrade*. KCJB memiliki empat stasiun perhentian di sepanjang lintasan, yaitu Stasiun Halim (Jakarta), Stasiun Karawang, Stasiun Padalarang, dan Stasiun Tegalluar (Bandung). Kereta inspeksi KCJB dirancang untuk mampu mendeteksi kondisi lintasan, kelistrikan, komunikasi, persinyalan, dan respons dinamis kereta. Kereta inspeksi ini akan dioperasikan setiap hari sebelum jalur digunakan untuk kereta penumpang.

Proyek KCJB merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung. Peraturan Presiden ini menyatakan dalam rangka percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung, Pemerintah menugaskan kepada konsorsium BUMN yang dipimpin oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero). Konsorsium BUMN terdiri atas PT Kereta Api Indonesia (Persero); PT Wijaya Karya (Persero) Tbk; PT Jasa Marga (Persero) Tbk; dan PT Perkebunan Nusantara VIII. Konsorsium BUMN dapat diwujudkan dalam bentuk perusahaan patungan.

Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 juga mengatur pembentukan Komite Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan Menteri Perhubungan. Komite ini mempunyai tugas antara lain menyepakati dan/atau menetapkan langkah yang perlu diambil untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan dalam hal terjadi masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya (*cost overrun*) proyek KCJB.

Riwayat pembengkakan biaya proyek KCJB merupakan hasil *review* Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 9 Maret 2022, yaitu sebesar US\$1,176 miliar. Hasil *review* kedua BPKP pada 15 September 2022 menemukan adanya tambahan biaya bengkak lagi sekitar US\$277 miliar. Penyebab biaya bengkak terkait dengan biaya perpajakan dan relokasi sejumlah fasilitas umum. Dengan demikian hasil *review* BPKP menemukan *cost overrun* proyek KCJB sebesar US\$1,449 miliar atau Rp21,4 triliun, dan telah selesai dibahas oleh Komite Kereta Cepat. Pada 23 November 2022, Komisi VI DPR RI menyetujui tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2022 kepada PT KAI sebesar Rp3,2 triliun untuk menyelesaikan proyek KCJB sesuai target pada Juni 2023. Tambahan PNM tersebut berasal dari cadangan investasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 dalam rangka pemenuhan permodalan porsi Indonesia atas *cost overrun* proyek KCJB.

Atensi DPR

Hasil *review* BPKP menemukan *cost overrun* proyek KCJB sebesar US\$1,449 miliar atau Rp21,4 triliun. Komisi VI DPR RI telah menyetujui tambahan PMN tahun 2022 kepada PT KAI dalam rangka penyelesaian proyek KCJB tepat waktu dan tepat biaya sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan, yakni Juni 2023. Oleh karena itu, Komisi VI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan atas APBN perlu melakukan pengawasan terhadap penyelesaian proyek KCJB tersebut. Komisi VI perlu memastikan KCJB dapat mendorong perekonomian negara, khususnya di wilayah Jawa Barat, antara lain melalui pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, KCJB perlu dipastikan digunakan sesuai peruntukannya dan mengikuti prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance*, tidak bergantung seterusnya ke keuangan negara, serta dapat memberikan manfaat ekonomi terhadap masyarakat sekitar dan tidak hanya bagi perusahaan besar.

Sumber

bisnis.com, 9 November 2022;
detik.com, 23 November 2022;
dpr.go.id, 24 November 2022;
kompas.com, 12 Oktober dan 26 November 2022;
merdeka.com, 13 Oktober 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q
Rasbin
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022